



RENCANA KERJA (RENJA) 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung 56221 Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327

Surat elektronik: disnakertmg@gmail.com

Laman : dinperinaker.temanggungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumberdaya
Alam, dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, S.T
NIP. 198111012009031003

Petugas Verifikator



ROSITA PUTRI DIANI, SE
NIP. 199405012019032006

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dimaksudkan memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan yang dirinci dalam program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, terutama apabila dilakukan review atas Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 – 2026	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	28
2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)	28
2.3 Data Pokok	36
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	42
2.5 <i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal RKPD	46
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	62
2.7 Inovasi Perangkat Daerah	62
2.8 Penghargaan	63
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	64
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	64
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	69
4.1 Program dan Kegiatan	69
BAB V PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja s.d Tahun 2024	11
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja s.d Tahun 2025 Triwulan II	16
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Temanggung	29
Tabel 2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025 Tw II	36
Tabel 2.5 Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025 Tw II	36
Tabel 2.6 Persentase Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025 Tw II	37
Tabel 2.7 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025 Tw II	37
Tabel 2.8 Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih Melalui Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 – 2025 Tw II	38
Tabel 2.9 Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025 Tw II	38
Tabel 2.10 Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang Terfasilitasi Sesuai Prosedur Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025 Tw II	39
Tabel 2.11 Persentase Kepersertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025 Tw II	39
Tabel 2.12 Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025 Tw II	40
Tabel 2.13 Persentase Terpenuhinya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025 Tw II	40
Tabel 2.14 Presentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Selesai melalui Mediasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025 Tw II	41
Tabel 2.15 Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025 Tw II	41
Tabel 2.16 IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025 Tw II	42

Tabel 2.17 Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025 Tw II.....	42
Tabel 2.18 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026	48
Tabel 2.19 Usulan program dan kegiatan masyarakat.....	62
Tabel 2.20 Daftar Inovasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023	62
Tabel 2.21 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023	63
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2026	65
Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2026	70
Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

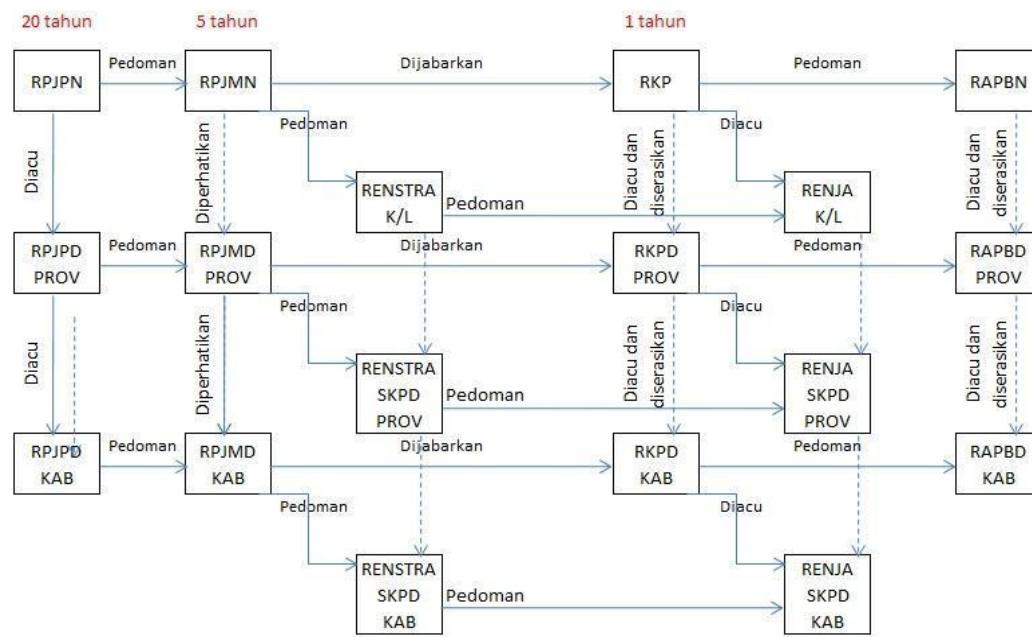
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pemberian daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari

seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. *Telaahan Kebijakan Nasional;*

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. *Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;*

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. *Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan*

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. *Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.*

Dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. *Landasan Hukum*

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
s.d Tahun 2024

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	44	5.167.159.308	12	5.159.466.934	5.510.771.269	12	5.401.894.560	100	98,024
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	10.000.000	10.000.000	1	9.997.000	100	99,970
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	28.639.000	1	23.639.000	27.639.000	1	27.295.870	100	98,759
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	24.491.450	1	19.491.450	19.491.450	1	18.338.800	100	94,086
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	27.000.000	12	22.000.000	22.000.000	12	21.714.300	100	98,701
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	78.866.000	12	73.866.000	77.866.000	12	77.280.349	100	99,248
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	15.000.000	12	10.000.000	5.000.000	12	3.985.000	100	79,700

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	115.000.000	12	110.000.000	78.500.000	12	68.885.821	100	87,753
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	586.760.950	12	581.760.950	587.760.950	12	562.361.647	100	95,679
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	88.884.531	25	83.884.531	85.384.531	25	72.340.333	100	84,723
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	137.494.570	1	132.494.570	30.500.000	1	27.706.000	100	90,839
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	12	32.000.000	10	27.000.000	22.500.000	10	18.725.000	100	83,222
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	73		72			73,78		100	
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	82		80			82,35		100	
e	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi											
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	Orang 300	858.521.250	208	850.000.000	800.000.000	208	770.858.981	100	96,357	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											
		Presentase pencari kerja yang ditempatkan	%	37		35			40,78		100	
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	32		30			98,77		100	
		Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	%	1,3		1			3,95		100	
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	94		90			100		100	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
f Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota												
	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	1500	70.000.000	200	50.000.000	10.000.000	661	9.998.000	100	99,98
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang	4	27.000.000	5	10.000.000	0	0	0	0	0
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	140	307.010.000	64	100.000.000	230.000.000	64	206.604.550	100	89,83
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL											
		Percentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	%	83,4		82,37			87,80		100	
		Percentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	75		69,75			79,67		100	
		Percentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	47		45			82,93		100	
		Percentase perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100		100			100		100	
g	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota											
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	101.002.500	1	0	65.000.000	1	64.922.429	100	99,88
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							0					
		Percentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	85,2		71,62			82,19		100	
		Percentase Pembinaan IKM tembakau lembutan	%	26,53		15,3			15,47		100	
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI											
h	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	250.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	468.120.250	1	160.000.000	535.000.000	1	526.020.045	100	98,32
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	100.000.000	1	50.000.000	75.000.000	1	74.620.200	100	99,49
							7.573.603.435	8.192.413.200		7.963.548.885		

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
s.d Triwulan II Tahun 2025

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)		78.42 - 78.80		78.10 - 78.48					78,06		99,95	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	44/ 12	5.167.159.308	44/12	5.810.830.81 8	6.128.598.50 2	6	2.828.970.064	6	2.828.970.064	50	46,16
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	12	10.000.000	10.000.000	6	0	6	0	50	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	28.639.000	12	23.639.000	23.639.000	6	0	6	0	50	0,00

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	24.491.450	12	19.491.450	19.491.450	6	500.000	6	500.000	50	2,57
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	27.000.000	12	22.000.000	22.000.000	6	176.000	6	176.000	50	0,80
	Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	78.866.000	12	73.866.000	73.866.000	6	7.951.614	6	7.951.614	50	10,76
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	15.000.000	12	12.000.000	12.000.000	6	0	6	0	50	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	115.000.000	12	85.000.000	85.000.000	6	30.243.452	6	30.243.452	50	35,58
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	586.760.950	12	523.200.000	523.200.000	6	254.926.981	6	254.926.981	50	48,72

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025		
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	88.884.531	17	83.884.531	83.884.531	5	21.745.448	5	21.745.448	29	25,92	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			8	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	137.494.570	10	20.000.000	20.000.000	1	225.000	1	225.000	10	1,13	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	32.000.000	2	10.000.000	35.000.000	2	32.745.500	2	32.745.500	100	93,56	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan	%	73		72,56			69,31		69,31		95,52		

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	berbasis kompetensi													
	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	82			81			35, 29		35,294		43,57	
e	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi													
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	Orang	300	858.521.250	224	600.000.000	600.000.000	204	24.856.500	204	24.856.500	91	4,14
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Lembaga	20		20	13.000.000	13.000.000	12	300.000	12	300.000	60	2,31
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
		Presentase pencari kerja yang ditempatkan	%	37		36			27, 76		27,76		77,10	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	32		31			77, 69		77,69		100	
		Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	%	1,3		1,2			10, 2		10,204		100	
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	94		92			100		100,00		100	
f	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota													
	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	150 0	70.000.000	200	88.000.000	88.000.000	204	11.680.000	204	11.680.000	100	13,27
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang			750	10.000.000	10.000.000	571	2.780.000	571	2.780.000	76,13	27,80

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang	4	27.000.000	5	50.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0,00
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	140	307.010.000	75	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota													
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang			4	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0	0,00
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
		Persentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	%	83, 4		83,37			87, 64		87,64		100	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	75		70			77,52		77,52		100	
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	47		46			79,84		79,84		100	
		Persentase perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100		100			100		100		100	
g	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota													
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang dicegah	Perkara	1	101.002.500	10	80.000.000	150.000.000	8,0	63.253.450	8,0	63.253.450	80	79,07
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27, 44		27,35			25, 53		25,53		93,35	
		Percentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	85, 2		71,62			85, 21		85,21		100,00	
		Percentase Pembinaan IKM tembakau lembutan	%	26, 53		15,3			15, 47		15,47		100,00	
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													
h	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota													
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokume n	1	250.000.000	1	18.670.713	65.000.000	0	3.365.000	0	3.365.000	0	18,0229
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokume n	1	468.120.250	2	325.000.000	275.000.000	0	2.509.500	0	2.509.500	0	0,77

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota														
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	Dokumen	1		1	60.000.000	25.000.000	0	200.000	0	200.000	0	0
	JUMLAH						8.222.582.61 1	8.321.679.48 3					3.286.428.509	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
 - b. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina
 - c. Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
 - d. Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan
 - e. Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja
 - f. Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur
 - g. Persentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan
 - h. Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK
 - i. Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja
 - j. Persentase perselisihan hubungan industrial melalui mediasi
 - k. Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah
 1. Persentase Pembinaan IKM tembakau lembutan
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - l. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
 - m. Pelayanan Antar Kerja
 - n. Perluasan Kesempatan Kerja
 - o. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - p. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada tahun 2024 tidak ada sub kegiatan yang pelaksanaannya melebihi target kinerja yang direncanakan.
5. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
- a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dengan capaian 93,69%
6. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan. Tidak ada capaian kinerja program yang tidak memenuhi target kinerja.
7. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
- a. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **97,64%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis

- a. Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB;

Capaian Kinerja : 95,29 % kategori Baik

- b. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;

Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik

2. Sasaran Program

- a. Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja, serta meningkatnya kesempatan kerja

Capaian Kinerja : 100% kategori baik

- b. Meningkatnya hubungan industri yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat

Capaian Kinerja : 100% kategori baik

- c. Meningkatnya kompetensi SDM IKM

Capaian Kinerja : 100% kategori baik

Dari Tabel 2.2. data Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II 2025	Status Capaian				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,8	76,15	76,2	76,25	78,06	78,06		100	v				
2	Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB	%	25,92	27,2	27,25	27,3	25,53	25,53		93,69	v				
3	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	72,39	72	72,56	73	73,78	69,31		95,52	v				
4	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	%	n.a	80	81	82	82,35	35,294		43,57					v
5	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	84,88	35	36	37	40,78	27,76		77,10		v			
6	Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	%	n.a	1	1,2	1,3	3,95	10,2		100,00	v				
7	Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	n.a	30	31	32	98,77	77,69		100,00	v				

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II 2025	Status Capaian				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
8	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	n.a	90	92	94	100	100		100	v				
9	Presentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	%	94,71	82,37	83,37	83,4	88,15	87,64		100	v				
10	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	79,31	69,75	70	75	79,67	77,52		100	v				
11	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	n.a	45	46	47	82,93	79,84		100	v				
12	Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100		100	v				
13	Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	70,46	71,62	78,2	85,2	82,19	85,21		100	v				
14	Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	%	12,29	15,3	20,95	26,53	15,47	15,47		73,84		v			

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan predikat sangat tinggi ada 11 (Sebelas) indikator terdiri dari:
 - a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya keinginan masyarakat untuk bekerja di usia kerja serta adanya peningkatan penduduk yang bekerja Selain itu pada tahun 2024 terdapat industri baru yang masuk seperti SKT Djarum yang menyerap ibu rumah tangga menjadi pekerja sehingga dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya peningkatan pada penduduk usia kerja serta adanya bonus demografi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan wirausaha baru dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).
 - b. Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah banyak industri pengolahan kayu di kabupaten temanggung yang masih tetap eksis pasca covid.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah pertumbuhan industri kabupaten temanggung pasca covid masih belum optimal dalam melakukan usaha industri sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menumbuhkan industri unggulan daerah melalui pelatihan diversifikasi produk.
 - c. Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan cukup tinggi.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan kuota pelatihan dikarenakan keterbatasan

jumlah anggaran yang diperhadapkan dengan animo masyarakat yang cukup tinggi, Khusus pelatihan DBHCHT hanya bisa diakses oleh masyarakat petani/keluarga buruh tembakau sehingga masyarakat umum tidak dapat mengakses pelatihan DBHCHT. Adanya efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berimbang pada pemangkasan paket pelatihan yang sudah teranggarkan di tahun 2025

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut Pengajuan perencanaan anggaran pelatihan melalui dana APBN (DIPA BBPVP Semarang) dan DBHCHT
- d. Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan perluasan kesempatan kerja cukup tinggi.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tahun 2025 tidak mendapatkan pagu anggaran untuk pelatihan perluasan kesempatan kerja.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut pengajuan anggaran perluasan kesempatan kerja.
- e. Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat tentang peran dinas cukup meningkat sehingga dinas mendapat kemudahan akses penyuluhan di tingkat desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterlambatan dalam pencairan UP kegiatan sehingga penyuluhan dan bimbingan jabatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal pada Triwulan I tahun 2025
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut Menjalin komunikasi secara aktif dengan desa untuk bisa mendapatkan akses waktu pada pertemuan pertemuan yang diadakan oleh Desa
- f. Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Layanan dapat dilakukan lebih cepat dan memberikan kemudahan pada CPMI Maupun P3MI untuk berproses
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pendaftaran dilakukan secara online, tidak bisa dilakukan verifikasi apabila yang bersangkutan tidak melengkapi dokumen sehingga tidak dapat melanjutkan wawancara. dalam perkembangannya aplikasi terbuka secara nasional dan CPMI dapat mendaftar darimana saja, namun Dinperinaker hanya dapat melayani terkait perlindungan CPMI hanya KTP Temanggung.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut Memperbanyak penyuluhan tentang proses penempatan ke luar negeri secara mudah dan aman. Menindaklanjuti CPMI yang sudah mendaftar di sistem Siap Kerja tetapi belum melanjutkan proses, Dinperinaker akan melakukan konfirmasi ke CPMI.
- g. Persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pengusaha menyadari resiko jika tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kondisi perusahaan yang tidak sepenuhnya baik dalam hal penjualan produk.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan.
- h. Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pengusaha menyadari pentingnya pekerja sebagai bagian dari faktor produksi barang dan jasa dalam meningkatkan profit.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih cukup banyak pekerja yang produktivitas kerjanya belum sesuai dengan yang diharapkan pengusaha.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan sosialisasi UMK kepada perusahaan.

- i. Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pengusaha menyadari bahwa fasilitas kesejahteraan pekerja adalah hak pekerja untuk menunjang kinerja
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum semua perusahaan mampu menyediakan fasilitas kesejahteraan untuk pekerja karena menyangkut keuangan dan area yang tersedia
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pembinaan kesejahteraan pekerja kepada perusahaan
 - j. Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah para pihak telah memahami prosedur penyelesaian perselisihan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Perundingan bipartit yang dimohonkan pekerja tidak ditanggapi oleh perusahaan, perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dilakukan peningkatan kapasitas SDM HRD dan SDM pekerja/serikat pekerja
 - k. Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah produk komoditas unggulan daerah banyak digemari masyarakat luas
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM pelaku usaha dan proses produksi produk unggulan daerah belum optimal
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pelatihan diversifikasi produk unggulan daerah
2. Capaian indikator dengan predikat tinggi ada 1 (satu) indikator yaitu:
- a. Persentase pencari kerja yang ditempatkan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah networking

yang cukup baik dengan perusahaan sehingga pelaksanaan rekrutmen di Dinas meningkat

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah pencari kerja masa kini cenderung memilih-milih pekerjaan; Pencari kerja kurang aktif dalam mengikuti seleksi atau rekrutmen, Ketersediaan lowongan kerja belum dapat mengakomodir pencaker laki-laki usia diatas 30 tahun, kualifikasi pencari kerja tidak memenuhi persyaratan lowongan. Daya tahan kerja pencaker muda sangat rendah.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah terus meningkatkan jalinan komunikasi dengan HRD Perusahaan; Meningkatkan upaya informasi rekrutmen maupun peluang kerja melalui media sosial maupun jaringan komunikasi desa.
3. Capaian indikator dengan predikat sedang ada 1 (satu) indikator yaitu:
- a. Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah meningkatnya permintaan pasar terhadap produk tembakau lembutan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah dukungan anggaran untuk kegiatan pembinaan IKM tembakau lembutan menurun dibandingkan tahun 2024
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menjalin komunikasi dengan para pihak terkait dan memanfaatkan event-event (pameran atau pertemuan) yang melibatkan IKM tembakau lembutan
4. Capaian indikator dengan predikat sangat rendah ada 1 (satu) indikator yaitu:
- a. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah proaktif melakukan monitoring secara langsung dengan LPKS baik dengan sistem jemput bola dan WAG
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran LPKS untuk mengirim laporan rutin tiap semester karena tidak ada sanksi khusus

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pertemuan rutin dengan lembaga pelatihan kerja untuk mewujudkan lembaga pelatihan kerja yang sehat dengan program kegiatan sesuai dengan peraturan

2.3 Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Ketenagakerjaan dan Data Pokok Bidang Perindustrian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025 Tw II

Uraian	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	58,73	74,01	74,01	75,80	78,06	78,06

b. Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Realisasi persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5

Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Temanggung,
Tahun 2020-2025 Tw II

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	320	112	80	464	336	192
Jumlah pendaftar pelatihan	545	322	112	641	987	521
Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	58,72	34,78	71,43	72,39	73,78	69,3

- c. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina
 Realisasi Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina tahun 2020-2025 Tw II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Dibina
Tahun 2020 - 2025 Triwulan II

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah LPKS yang dibina	n.a	n.a	n.a	n.a	28	12
Jumlah LPKS Keseluruhan	n.a	n.a	n.a	n.a	34	34
Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Dibina	n.a	n.a	n.a	n.a	82,35	35,29

- d. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
 Realisasi persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun 2020-2025 Tw II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2025 Triwulan II

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pencari Kerja terdaftar yang tertempatkan	602	1.749	773	679	661	204
Pencari Kerja terdaftar	1.088	2.242	1442	800	1.621	735
Persentase Pencari Kerja terdaftar yang Ditempatkan	55,33	78,01	53,61	84,88	40,78	27,76

- e. Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja
 Realisasi pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja tahun 2020 – 2025 Tw II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih Melalui
Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2020 - 2025 Tw II

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Peserta Pelatihan Perluasan Kesempatan Kerja	n.a	n.a	n.a	n.a	64	75
Jumlah Pencaker terdaftar	n.a	n.a	n.a	n.a	1.621	735
Persentase Pencari Kerja yang Dilatih Melalui Perluasan Kesempatan Kerja	n.a	n.a	n.a	n.a	3,95	10,20

- f. Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan

Realisasi persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9

Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Tahun 2020 - 2025 Triwulan II

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Pencaker yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	n.a	n.a	n.a	n.a	1.601	571
Jumlah pencaker terdaftar	n.a	n.a	n.a	n.a	1.621	735
Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	n.a	n.a	n.a	n.a	98,77	77,69

- g. Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur

Realisasi persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur tahun 2020 – 2025 Tw II dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10
Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang Terfasilitasi Sesuai Prosedur di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2025 Triwulan II

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah CPMI yang Terfasilitasi	n.a	n.a	n.a	n.a	302	201
Jumlah CPMI terdaftar	n.a	n.a	n.a	n.a	302	201
Persentase CPMI yang Terfasilitasi Sesuai Prosedur	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100

h. Persentase Kepersertaan Program BPJS Ketenagakerjaan

Realisasi Persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020-2025 Tw II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Persentase Kepersertaan Program BPJS Ketenagakerjaan
Tahun 2020 - 2025 Triwulan II

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan	18.223	16.328	24.672	21.472	19.955	20.960
Jumlah pekerja total	27.751	26.732	29.062	23.641	22.638	23.917
Persentase kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan (%)	65,67	61,08	84,89	90,83	88,15	87,64

i. Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK

Realisasi Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK tahun 2020 – 2025 Tw II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12

Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK Kabupaten Temanggung, Tahun 2020–2025 Triwulan II

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Perusahaan Yang melaksanakan UMK	84	82	91	93	98	100
Jumlah Perusahaan	397	119	119	114	123	129
Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK (%)	21,16	68,91	76,47	81,58	79,67	77,52

- j. Persentase Terpenuhinya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
- Realisasi persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja tahun 2020-2025 Tw II dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13

Persentase Terpenuhinya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 - 2025 Triwulan II

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah perusahaan yang memenuhi fasilitas kesejahteraan pekerja	n.a	n.a	n.a	n.a	102	103
Jumlah perusahaan	n.a	n.a	n.a	n.a	123	129
Persentase Terpenuhinya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	82,93	79,84

- k. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Selesai melalui Mediasi
- Realisasi Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi tahun 2020-2025 Tw II dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.14
Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Selesai melalui Mediasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 – 2025 Triwulan II

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Perselisihan Yang Selesai Melalui Mediasi	13	14	14	20	8	3
Jumlah Perselisihan Yang Dimohonkan Mediasi	14	17	15	20	8	3
Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi (%)	92,86	82,35	93,33	100	100	100

2. Data Pokok Bidang Perindustrian

a. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB

Realisasi Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun 2020-2025 Tw II dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.15
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025 Tw II

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	27,46	27,11	26,19	25,92	25,53	25,53

b. Presentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah

Realisasi Presentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.16
Presentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas
Unggulan Daerah Kabupaten Temanggung,
Tahun 2020-2025 Triwulan II

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah IKM Unggulan Daerah yang Terfasilitasi	n.a	60	210	229	300	311
Jumlah IKM Unggulan Daerah	n.a	325	325	325	365	365
Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	n.a	18,46	64,62	70,46	82,19	85,21

c. Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan

Realisasi Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan tahun 2020-2025 Tw II dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17
Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 – 2025 Triwulan II

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah IKM Tembakau yang Dibina	n.a	75	355	440	560	560
Jumlah IKM Tembakau	n.a	3580	3580	3.580	3620	3620
Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan (%)	n.a	2,09	992	12,29	15,47	15,47

2.4 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dari 14 indikator terdapat 5 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB
Hal ini disebabkan karena data pada indikator ini diperoleh dari data publikasi BPS dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak memiliki metode perhitungan. Selain itu hal ini disebabkan pertumbuhan industri kabupaten temanggung pasca covid masih belum optimal dalam melakukan usaha industri sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- Indikator Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Hal ini dikarenakan Keterbatasan kuota pelatihan dikarenakan keterbatasan jumlah anggaran yang diperhadapkan dengan animo masyarakat yang cukup tinggi, Khusus pelatihan DBHCHT hanya bisa diakses oleh masyarakat petani/keluarga buruh tembakau sehingga masyarakat umum tidak dapat mengakses pelatihan DBHCHT serta adanya efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berimbas pada pemangkasan paket pelatihan yang sudah teranggarkan di tahun 2025.
- Indikator Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina
Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran LPKS untuk mengirim laporan rutin tiap semester karena tidak ada sanksi khusus.
- Indikator Persentase pencari kerja yang ditempatkan
Hal ini disebabkan pencari kerja masa kini cenderung memilih-milih pekerjaan; pencari kerja kurang aktif dalam mengikuti seleksi atau rekrutmen, Ketersediaan lowongan kerja belum dapat mengakomodir pencaker laki-laki usia diatas 30 tahun, kualifikasi pencari kerja tidak memenuhi persyaratan lowongan. Daya tahan kerja pencaker muda sangat rendah.

- Indikator Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan Hal ini disebabkan karena terbatasnya teknologi pengolahan tembakau dan dukungan anggaran untuk kegiatan pembinaan IKM tembakau lembutan menurun dibandingkan tahun 2024.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, antara lain :

- Ketersediaan anggaran yang terbatas mempersempit ruang gerak dalam penanganan pencari kerja.
- Penanganan terhadap masalah pengangguran dan disabilitas belum secara keseluruhan dan berkelanjutan, baru dapat dilaksanakan secara parsial karena keterbatasan anggaran.
- Lowongan kerja yang tersedia didominasi untuk perempuan pada 18 s.d 30 tahun, sehingga pencari kerja perempuan di atas usia tersebut dan pencari kerja laki-laki kesulitan dalam mencari pekerjaan.
- Belum memiliki sarana perhitungan yang efektif untuk mendata pengangguran secara riil ditingkat desa dan kecamatan.
- Beberapa peralatan pelatihan yang belum ter-upgrade
- Kurangnya kuota pelatihan
- Sarana dan prasarana untuk pelatihan yang kurang memadai
- Masih banyak Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan PKWT. Padahal jenis pekerjaan yang dilakukan Pekerja/Buruh bukan jenis pekerjaan yang bisa di PKWT-kan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
- Masih banyak Pengusaha yang belum membuat Struktur dan Skala Upah. Padahal Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Juncto Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Junctis Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 telah mewajibkan;

- Masih banyak Pengusaha yang belum memahami cara membuat Peraturan Perusahaan dan tata cara mengajukan pengesahannya;
- Masih banyak Pengusaha dan/atau manajemen dan/atau HRD dan Pengurus SP/SB Unit Kerja yang belum memahami cara membuat Perjanjian Kerja Bersama dan tata cara pendaftarannya;
- Masih banyak Pekerja/Buruh/Pengurus SP/SB yang belum sepenuhnya memahami fungsi SP/SB dalam memperjuangkan hak-hak Pekerja/Buruh dan keluarganya; dan
- Masih banyak HRD sebagai wakil Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang belum mengetahui dan memahami prosedur penyelesaian PHI
- Produktifitas industri kecil masih rendah.
- Tingkat pengetahuan, sikap dan ketrampilan pelaku industri kecil belum optimal dalam menghasilkan produk yang berkualitas, inofatif dan berdaya saing dipasaran.
- Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melegalkan usaha dan produk yang dihasilkan.
- Kualitas dan standar mutu produk belum optimal
- Kesadaran industri kecil masuk akun SIINas sangat rendah
- Kepatuhan industri dalam pelaporan perkembangan usaha melalui aplikasi SIINas masih minim

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- Mendapatkan anggaran sesuai kebutuhan.
- Pelaksaaan kegiatan secara keseluruhan dan berkesinambungan dengan dukungan anggaran yang memadai.
- Berusaha menyusun metode dan strategi untuk mendapatkan data pengangguran ditingkat desa dan kecamatan secara riil.
- Adanya bantuan peralatan pelatihan

- Adanya penambahan anggaran agar kuota pelatihan bisa memenuhi animo peserta pelatihan
- Pemeliharaan sarana prasarana pelatihan
- Agar laksanakan monitoring secara berkala untuk memperoleh data ketenagakerjaan dan sarana hubungan industrial
- Dilaksanakan pemberdayaan HRD sebagai Wakil Pengusaha dan Pekerja/Buruh/Pengurus SP/SB secara terus menerus melalui kegiatan peningkatan kapasitas baik klasikal maupun non klasikal (outbond/studi informasi)
- Pendampingan, pelatihan dan fasilitasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas, inofatif dan berdaya saing dipasaran
- Pendampingan, pelatihan dan fasilitasi kepada IKM tentang menegemen mutu dan standarisasi produk
- Pendampingan dan sosialisasi IKM tentang perizinan usaha industri dan SII Nas.

2.5 ***Review terhadap rancangan awal RKPD***

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
 - b. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kab/Kota
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.18 berikut:

Tabel 2.18
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/Ke giatan	Targ et Kine rja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.697.012.320		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					8.625.469.818	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.565.762.320		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.865.469.818	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.810.830.818		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.910.830.818	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tem angg ung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	Orang / bulan	5.810.830.818		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tem angg ung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	Orang / bulan	5.910.830.818	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.028.952		Administrasi Umum Perangkat Daerah					157.639.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tem angg ung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tem angg ung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	12.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tem angg ung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	20.639.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tem angg ung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	25.639.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/Ke giatan	Targ et Kine rja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tem angg ung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	17.491.450		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tem angg ung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	21.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tem angg ung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Lapor an	14.232.502		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tem angg ung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Lapor an	23.000.000	
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tem angg ung	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lapor an	34.666.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tem angg ung	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lapor an	76.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					544.018.019		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					652.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tem angg ung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lapor an	2.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tem angg ung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lapor an	12.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tar get Kine rja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tar get Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lapor an	85.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lapor an	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lapor an	457.018.019		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lapor an	550.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					118.884.531		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					145.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	17	Unit	83.884.531		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	85.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/Ke giatan	Targ et Kine rja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
			Pajak dan Perizinannya											
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tem angg ung	Jumlah mebel yang dipelihara		Unit	-		Pemeliharaan Mebel	Kab. Tem angg ung	Jumlah mebel yang dipelihara	8	Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tem angg ung	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26	Unit	10.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tem angg ung	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	Unit	20.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tem angg ung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1	Unit	25.000.000		Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tem angg ung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	Unit	30.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					-	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					0		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					-	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Doku men	0		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Doku men	50.000.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					611.000.000		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					913.000.000	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					600.000.000		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					900.000.000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160	Orang	600.000.000		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160	Orang	900.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/Ke giatan	Targ et Kine rja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						11.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						13.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	20	Lembaga	11.000.000		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	20	Lembaga	13.000.000	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						400.250.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						497.000.000	
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						380.000.000	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						470.000.000	
	Pelayanan antar Kerja	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200	Orang	9.000.000		Pelayanan antar Kerja	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200	Orang	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/Ke giatan	Targ et Kine rja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	- Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	750	orang	9.000.000		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	- Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	480	orang	10.000.000	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	- Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	5	Orang	22.000.000		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	- Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	10	Orang	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Tem anggung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60	Orang	340.000.000		Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Tem anggung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	75	Orang	400.000.000	
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota					20.250.000		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota					27.000.000	
	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Tem anggung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	3	Orang	20.250.000		Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Tem anggung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	4	Orang	27.000.000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					120.000.000		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					350.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/Ke giatan	Targ et Kine rja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					120.000.000		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					350.000.000	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berd ampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	- Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	8	Perka ra	120.000.000		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10	Perka ra	150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kab/Kota	- Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lemb aga	0		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kab/Kota	- Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lemb aga	200.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				340.000.000			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				50.670.000.000		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				315.000.000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				50.550.000.000		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				315.000.000			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				50.550.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tar get Kine rja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tar get Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Doku men	50.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Doku men	200.000.000	Fasilit asi dan Pembi naan poten si unggul lan daera h
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Doku men	250.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- Kab. Tem angg ung, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Doku men	50.000.000.000	Pemb angunan APHT (Aglo merasi Pabrik Hasil Tembakau)

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tar get Kine rja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tar get Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Doku men	15.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Doku men	350.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					70.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					70.000.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Dokumen	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Dokumen	70.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					25.000.000		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				50.000.000		
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					25.000.000		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tar get Kine rja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tar get Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Doku men	25.000.000		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Doku men	50.000.000	
JUMLAH					8.037.012.320		JUMLAH					59.295.469.818		

Sumber : (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Namun dalam proses ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.19
Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan

NIHIL

2.7 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ada 1(satu) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.20
Daftar Inovasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1.	Training Anti Gabut	Semua SDM Dinperinaker	APBDes	Pelatihan jemput bola oleh Dinperinaker yang dilaksanakan di desa-desa di wilayah Kabupaten Temanggung, untuk menyiapkan lulusan pelatihan yang terampil guna memasuki dunia kerja maupun merintis usaha	Lulusan Pelatihan yang Terampil	SDM Lulusan pelatihan yang terampil sehingga siap membuka usaha baru maupun masuk ke dunia kerja	Dinperinaker / 2022

2.8 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ada 2 (dua) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.21
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Piagam Penghargaan atas pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah ke 2 Tahun 2021	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DINPERINAKER
2	Piagam Penghargaan atas pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah ke 2 Tahun 2023	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DINPERINAKER
3	Piagam Penghargaan atas Pencapaian Target Pendataan Industri Kecil Tahun 2023 Melalui SIINas Sebesar 118%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DINPERINAKER

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merujuk pada sasaran dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perindustrian.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2025-2029 adalah “Meningkatnya kualitas tenaga kerja, hubungan industrial serta sektor industri dalam pembangunan ekonomi”, dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas dan tata Kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik, meningkatnya perlindungan bagi tenaga kerja, meningkatnya sektor industri dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu;
3. dan Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)	
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)		
3.31.2.07.3.32.05.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja												
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			Meningkatnya Kualitas Tenaga kerja, hubungan industrial serta sektor industri dalam pembangunan ekonomi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) (%)	78.06	78.10-78.48	78.42-78.80	78.74-79.12	79.00-79.44	79.32-79.76	79.64-80.00	
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	25.53	27.35	27.44	27.80	28.15	28.45	28.50	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	86.70	86.71	86.72	86.73	86.74	86.75	86.76	
				Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	72.55	72.8	73	73.2	73.4	73.6	73.8	
		Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	54.78	57.00	60.32	63.45	66.73	70.18	73.81		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten (%)	-	0.38	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.697.012.320	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.697.012.320	-
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.565.762.320	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.565.762.320	0
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.810.830.818	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.810.830.818	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.810.830.818		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.810.830.818	0
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.028.952	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.028.952	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.639.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.639.000	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.491.450		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.491.450	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.232.502		Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.232.502	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.666.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.666.000	0
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.018.019	c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.018.019	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.018.019		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.018.019	-

RANCANGAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.884.531	d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.884.531	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.884.531		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.884.531	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	-
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	611.000.000	2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	611.000.000	-
e	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	600.000.000	e	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	600.000.000	-
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	600.000.000		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	600.000.000	-
f	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.000.000	f	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.000.000	0
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.000.000		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.000.000	0
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	400.250.000	3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	400.250.000	-
g	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	380.000.000	g	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	380.000.000	-
	Pelayanan antar Kerja	9.000.000		Pelayanan antar Kerja	9.000.000	-
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	9.000.000		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	9.000.000	0

RANCANGAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	22.000.000		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	22.000.000	-
	Perluasan Kesempatan Kerja	340.000.000		Perluasan Kesempatan Kerja	340.000.000	-
h	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	20.250.000	h	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	20.250.000	0
	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	20.250.000		Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	20.250.000	0
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	120.000.000	3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	120.000.000	0
i	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	i	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	0
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	0
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	340.000.000	B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	340.000.000	-
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	315.000.000	4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	315.000.000	-
j	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	315.000.000	j	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	315.000.000	-

RANCANGAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	50.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	50.000.000	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	250.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	250.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	15.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	15.000.000	-
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	25.000.000	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	25.000.000	-
k	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	k	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	-
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	25.000.000		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	25.000.000	-
JUMLAH		8.037.012.320	JUMLAH		8.037.012.320	-

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2026

Dari tabel 4.1 tabel Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2026 dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2026 .

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung
Tahun 2026

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
2	0	7	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegia tan			Tolok Ukur	Target			
											7.697.01 2.320				7.697.01 2.320		
2	0	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								7.697.01 2.320				7.697.01 2.320		
2	0	7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perindustri an dan Tenaga Kerja				86,7 2%			6.565.76 2.320				86,73% 6.565.76 2.320		
				Nilai AKIP Dinas Perindustri an dan Tenaga Kerja				73%							73,20%		
2	0	7	0	1	2.	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.810.83 0.818			5.810.83 0.818	
2	0	7	0	1	2.0	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temangg ung	52 Orang/B ulan		5.810.830 .818	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/B ulan	5.810.830 .818
2	0	7	0	1	2.	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.028.9 52			92.028.9 52	

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027						
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
								Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegia tan			Tolok Ukur	Target					
2	0	0	1	2.0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Temanggung		12 Paket		5.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000
2	0	0	1	2.0	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Temanggung		12 Paket		20.639.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.639.000
2	0	0	1	2.0	0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Temanggung		12 Paket		17.491.450	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	17.491.450
2	0	0	1	2.0	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Temanggung		12 Laporan		14.232.502	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.232.502

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegia tan			Tolok Ukur	Target			
2	0	0	1	2.0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Temanggung		12 Laporan		34.666.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	34.666.000
2	0	0	1	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						544.018.019					544.018.019	
2	0	0	1	2.0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Temanggung		12 Laporan		2.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000
2	0	0	1	2.0	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Temanggung		12 Laporan		85.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000
2	0	0	1	2.0	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Temanggung		12 Laporan		457.018.019	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	457.018.019

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										Progr am	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan								
2	0	0	1	2.	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							118.884. 531				118.884. 531		
2	0	0	1	2.0	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Temangg ung		17 Unit		83.884.53 1	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		17 Unit	83.884.53 1
2	0	0	1	2.0	09	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Kab. Temangg ung		26 Unit		10.000.00 0	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		26 Unit	10.000.00 0
2	0	0	1	2.0	09	0	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi		Kab. Temangg ung		1 Unit		25.000.00 0		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi		1 Unit	25.000.00 0
2	0	0	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA S TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja mendapatk an pelatihan berbasis kompetensi				50%			611.000. 000				54%	611.000. 000	

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
								Progr am	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
				Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina				82%						83%	
2	0	0	3	2.	01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					600.000.000				600.000.000
2	0	0	3	2.0	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Orang	600.000.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 Orang	600.000.000
2	0	0	3	2.	02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					11.000.000				11.000.000
2	0	0	3	2.0	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Lembaga	11.000.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	20 Lembaga	11.000.000

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
								Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegia tan			Tolok Ukur	Target		
2	0	0	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatk an (dalam dan luar negeri) melalui mekanism e layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten				37%			400.250. 000		37,50%	400.250. 000
						Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan				32%					33%	
						Persentase pencari kerja yang mendapatk an pekerjaan				37%					37,50%	
						Persentase CPMI yang terfasilitas i sesuai prosedur				94%					94,50%	

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegia tan			Tolok Ukur	Target	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)				69,5 9%						70,17%	
2	0 7	0 4	2. 01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota							380.000. 000			380.000. 000
2	0 7	0 4	2.0 1	0 2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Temangg ung, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a		200 Orang		9.000.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200 Orang	9.000.000
2	0 7	0 4	2.0 1	0 3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	- Kab. Temangg ung, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a		750 Orang		9.000.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	750 Orang	9.000.000
2	0 7	0 4	2.0 1	0 4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	- Kab. Temangg ung, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a		5 Orang		22.000.00 0	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	10 Orang	22.000.00 0

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
								Progr am	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2	0	0	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa		60 orang		340.000.00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	POKIR	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60 Orang	340.000.00
2	0	0	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota						20.250.00				20.250.00	
2	0	0	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Orang		20.250.00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	3 Orang	20.250.00
2	0	0	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menjalankan Norma Ketenagakerjaan			42,52			120.000.000				42,97	120.000.000
					Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK			75,00%							75,00%	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegia tan			Tolok Ukur				
					Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja				47%						47,00%			
					Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi				100%						100%			
2	0	0	5	2,02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							120.000. 000				120.000. 000		
2	0	0	5	2,0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8	Perkara		120.000.0 00	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	120.000.0 00	
3	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							340.000. 000				340.000. 000		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Progr am	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
3	3	0	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah			48,2 7%			315.000.000			51,55%	315.000.000
3	3	0	2	2.	01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						315.000.000				315.000.000
3	3	0	2	2.0	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		50.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	50.000.000
3	3	0	2	2.0	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		250.000.000	DBH Cukai Hasil Tembakan (CHT)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		250.000.000
3	3	0	2	2.0	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	15.000.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Progr am	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
3	3	0	4		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas			2%			25.000.00			2,20%	25.000.00
3	3	0	4	2.	01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						25.000.00				25.000.00
3	3	0	4	2.0	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	25.000.00
												8.037.012.320				8.037.012.320

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 97,20 % dari total pagu Rp. 8.192.413.200,- telah terealisasi sebesar 7.963.548.885,- , sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 40,26%, dari total pagu Rp. 8.162.033.075,- telah terealisasi sebesar , -

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 8.222.582.512,- yang terdiri dari 6 (enam) program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;

3. Program Penempatan Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;
5. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660712 199403 2 006